

ARAH RESTRUKTURISASI INDUSTRI AGRIBISNIS PERUNGGASAN DI INDONESIA

Yusmichad Yusdja ¹⁾ dan Effendi Pasandaran ²⁾

ABSTRACT

The period of 1997-1998 was a crucial time for our country. Indonesia was hit strongly by monetary crisis. Indonesia's production and prices and much of the industrial Asia collapsed. Many industries in Indonesia depending on imported raw material went on bankruptcy. One of these industries was poultry industry. At this time (1997-1998) the eggs and meats production decreased steadily. This paper presents a clear, accurate and interesting picture of the poultry industry structure. It was founded that the major efficient sources covered by poultry industries were feed industries, breeding farms and small scale of the poultry farms. The main conclusion is that an increase in the size of the feed industry unit lead to an increase in the inequality of income distribution. The main solution of establishing the poultry industry is to remove regulatory or other constraints to competitiveness and encourages small farms to enter the established arenas.

Key words : *poultry industry, restructuritation.*

ABSTRAK

Tahun 1997-1998 merupakan periode yang krusial bagi negara kita. Badai krisis moneter telah memporakporandakan perekonomian Indonesia. Produksi dan harga-harga baik di Indonesia serta industri di negara-negara Asia lainnya tidak dapat berkitik lagi. Banyak industri yang tergantung kepada bahan baku impor menjadi bangkrut. Salah satu dari industri ini adalah industri peternakan unggas. Saat ini (1997-1998), produksi telur dan daging terus menurun. Makalah ini menggambarkan struktur industri perunggasan secara jelas, teliti, dan menarik. Didapatkan bahwa sumber-sumber ketidakefisienan yang utama di dalam industri unggas adalah industri makanan ternak, pembibitan, dan skala usaha ternak. Kesimpulan utama adalah peningkatan skala usaha industri makanan ternak akan membawa peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pemecahan masalah yang utama dalam mendirikan industri perunggasan yang mapan adalah dengan menghilangkan peraturan-peraturan atau hambatan-hambatan lainnya dalam meningkatkan daya saing dan mendorong peternak skala kecil ke dalam arena yang sudah mapan.

Kata kunci : *industri perunggasan, restrukturisasi.*

PENDAHULUAN

Badai krisis moneter tampaknya telah berhasil memporakporandakan perekonomian Indonesia. Indonesia harus membayar semua kekeliruan masa lalu dengan harga yang sangat mahal. Sekarang di hadapan mata telah terhidang angka-angka yang mencemaskan tentang kenaikan jumlah pengangguran, menurunnya aktivitas perekonomian di semua sektor dan meningkatnya jumlah orang miskin. Salah satu kunci dasar untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia adalah dengan menggairahkan pembangunan pertanian seluas-luasnya terutama untuk pengadaan pangan yang cukup.

Pertanian memang merupakan salah satu sektor yang telah berulang kali membuktikan dirinya sebagai sektor yang tahan terhadap krisis perekonomian. Sangat tidak bijaksana jika Indonesia tidak memperlakukan sektor pertanian sebagai suatu asset kekayaan dasar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sebagai dasar bagi kegiatan pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Pembangunan pertanian yang tepat, akan membuat sektor-sektor yang terkait dengan produksi pertanian menjadi kokoh dan tahan terhadap berbagai krisis ekonomi. Pada kenyataannya, sektor industri pertanian di Indonesia, tampaknya sangat rapuh.

1) Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
2) Kepala Pusat Penyiapan program Badan Litbang Pertanian, Deptan.

Salah satu sektor industri pertanian yang menderita sangat parah adalah industri ayam ras. Industri ayam ras yang selama ini berperan sangat besar sebagai penghasil daging dan telur di Indonesia - bahkan diperkirakan sudah mencapai swasembada - ternyata sangat rentan, dan dengan mudah diporakporandakan oleh krisis moneter. Masyarakat mempertanyakan, mengapa di dalam suatu negara agraris, industri ayam ras dapat menderita demikian besar akibat badai krisis moneter? Bukankah bagaikan ayam mati di lumbung padi? Kenyataannya memang demikian.

Pil pahit ini mudah-mudahan mampu mengingatkan kita untuk mengkaji kembali kebijakan pembangunan industri pertanian di masa lalu. Makalah ini mencoba mengupas dampak kebijaksanaan pemerintah pada masa lalu terhadap kinerja industri unggas dan bagaimana sebaiknya kebijaksanaan restrukturisasi untuk mencapai industri unggas masa depan yang tangguh dan mandiri.

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP STRUKTUR INDUSTRI UNGGAS

Pengertian tentang struktur industri unggas dalam makalah ini meliputi seluruh tatanan komponen industri yakni struktur produksi, struktur industri bahan baku, struktur pasar baik bahan baku maupun produksi dan struktur komponen itu sendiri baik secara vertikal maupun horizontal. Industri perunggasan nasional khususnya ayam ras mulai berkiprah tahun 1972 sekalipun dalam bentuk usaha rakyat. Kemudian dengan masuknya impor teknologi dan dana investasi melalui PMA dan PMDN di bidang peternakan, maka industri perunggasan mengalami pertumbuhan yang spektakuler sehingga pada tahun 1990 Indonesia mampu swasembada daging dan telur (Sensus Peternakan, 1993). Namun, perkembangan ayam ras ini diiringi oleh gejala masyarakat yang menuntut usaha budi daya ayam ras merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat banyak. Gejala ini muncul, karena struktur produksi ayam ras tumbuh dalam usaha skala besar (Poultry Indonesia, 1997).

Setelah tahun 1990, gejala masyarakat semakin tinggi, karena pemerintah sebenarnya menemui jalan buntu dalam membenahi industri unggas secara keseluruhan. Akhirnya pada tahun 1998, dengan munculnya krisis moneter maka Industri perunggasan mengalami keruntuhan yang spektakuler pula. Pengalaman ini menyadarkan bahwa Indonesia harus belajar dari kesalahan masa lalu. Belajar dari

pengalaman akan lebih memantapkan restrukturisasi ke arah yang tepat dan mempercepat proses restrukturisasi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pandangan terhadap beberapa kebijaksanaan pemerintah yang diduga turut mendorong industri ayam ras mengalami masa sulit.

Pilihan Lokasi Industri: Dekat Sumber Bahan Baku Atau Konsumsi

Indonesia merupakan sebuah negara yang relatif luas dan terdiri lebih kurang 13.677 pulau yang menyebar dalam berbagai tipe iklim dan jenis lahan. Kondisi ini menimbulkan paling tidak dua masalah yakni perbedaan komoditas yang dihasilkan oleh setiap wilayah dan kebutuhan armada yang sangat mahal untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut. Perbedaan komoditas yang dihasilkan antarwilayah akan mendorong arus komoditas dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, dan biaya pengiriman akan sangat mahal jika fasilitas angkutan itu belum tersedia cukup.

Selain itu, pengiriman hasil pertanian dari tempat yang jauh dan dengan kendaraan angkutan yang belum dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang baik berisiko tinggi, antara lain keterlambatan, kematian ternak yang tinggi dan kerusakan barang sebelum sampai di tempat pengiriman. Pada sisi konsumsi, kemampuan masyarakat tidak merata di antara wilayah-wilayah tersebut. Pada kenyataannya, pusat konsumsi hasil pertanian dan industri pertanian terkonsentrasi di wilayah Jabotabek.

Dalam hal ini, khusus karena masalah demografi, jenis lahan, kesulitan transportasi, dan adanya wilayah konsumsi tinggi, maka ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam membangun suatu industri yang berbasis pertanian, yakni apakah industri itu dibangun di wilayah konsumsi dengan membiarkan biaya *input* industri menjadi lebih mahal, atau apakah pembangunan industri di wilayah penghasil bahan baku sehingga biaya pemasaran produksi menjadi lebih mahal. Pilihan pertama pasti akan membebani produsen sedangkan pilihan kedua akan membebani konsumen.

Pada masa lalu, para industriawan dan pemilik modal baik PMA maupun PMDN lebih menyukai membangun pabrik atau industri di wilayah Jabotabek, selain karena kedekatan dengan wilayah konsumsi, juga karena kedekatan dengan pelabuhan laut dan udara internasional di Jakarta, sebagai basis untuk mendatangkan bahan-bahan baku impor. Hal ini beralasan karena industri PMA dan PMDN sebagian

besar mengandalkan bahan baku dari impor. Sayangnya, kebijaksanaan ini diperlakukan pula bagi pembangunan industri ayam ras. Industri ayam ras sebenarnya sangat tergantung pada hasil pertanian yang bisa diproduksi di dalam negeri. Pada masa lalu hal ini tidak dipermasalahkan karena sejak semula kebutuhan bahan baku industri ayam ras khususnya pakan dan bibit berasal dari impor, maka memilih Jabotabek sebagai lokasi industri memang pilihan yang tepat. Namun demikian, inilah langkah pertama yang menyesatkan.

Sebagaimana dilaporkan oleh Statistik Peternakan (1995), hampir 90 persen dari pabrik pakan PMA dan PMDN memilih Jabotabek sebagai lokasi pabrik. Sejarah perkembangan industri ayam ras selama 25 tahun terakhir ini, memperlihatkan bahwa industri pakan pada akhirnya bergeser ke wilayah penghasil utama butir-butiran. Masalahnya terletak pada kebutuhan bahan baku pakan yang dari tahun ke tahun menghadapi kesulitan yang semakin besar. Misalnya kebutuhan jagung yang terus meningkat luar biasa. Tahun 1990 impor jagung hanya 500 ton, tetapi tahun 1996 telah melonjak menjadi 1.500.000 ton (Poultry Indonesia, 1997). Kebutuhan jagung yang terus membengkak ini, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh persediaan jagung dunia, oleh karena itu para industriawan unggas mengalihkan perhatian ke dalam negeri. Akibatnya, industri pakan terpaksa mendatangkan jagung dari berbagai propinsi.

Hutabarat dan Yusdja (1994) melaporkan telah terjadi aliran bahan baku pakan dari wilayah sentra produksi yakni dari Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Jabotabek, yang menimbulkan biaya pemasaran yang relatif tinggi. Dilaporkan juga, bahwa karena persaingan yang ketat di antara pabrik pakan dalam merebut jagung dalam negeri, telah memaksa pabrik pakan tersebut membangun pabrik-pabrik baru di wilayah-wilayah produksi (Yusdja dan Hutabarat, 1994). Dengan demikian telah terjadi pemborosan investasi sebagai akibat kesalahan dalam memilih lokasi industri pakan di wilayah Jabotabek.

Kesalahan dalam memilih lokasi Jabotabek juga dibuktikan dengan munculnya masalah lain, yakni berkembangnya usaha budi daya ayam ras rakyat di wilayah Jabotabek itu pula. Hal ini tidak dapat disalahkan, karena produksi pakan berada di wilayah Jabotabek tersebut. Lagipula, usaha rakyat sejak semula memang sudah dirancang untuk menggunakan pakan pabrik dan tidak membuat pakan sendiri. Padahal industri pakan itu sendiri tidak berbasis pada wilayah agraris tetapi berbasis pada wilayah konsumsi. Dengan

demikian, usaha budi daya, khususnya usaha rakyat tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan yang sangat besar pada industri pakan.

Kenyataan yang sangat menarik dari kasus ini adalah bahwa usaha rakyat yang tidak mampu bertahan dengan memenuhi kebutuhan dari pabrik pakan dan ketidak mampuan bersaing dengan skala besar di wilayah konsumsi telah menyebabkan mereka mengundurkan diri dari industri. Namun usaha rakyat tetap berdiri, tetapi di wilayah produksi butir-butiran. Ternyata di sana mereka lebih aman. Hasil penelitian (Yusdja dkk., 1996), Rusastra dkk., 1990) dan data BPS (1996) memperlihatkan, dalam periode 1976 sampai tahun 1985, usaha rakyat terkonsentrasi di wilayah Jabotabek. Namun setelah tahun 1986 sampai sekarang, sebagian besar usaha rakyat bergeser ke wilayah sentra produksi butir-butiran di wilayah Priangan Timur. Untuk Jatim, usaha peternakan rakyat bergeser dari sekitar kota Surabaya ke wilayah pedesaan seperti Kabupaten Malang, Kediri, Gresik dan sebagainya. Untuk Lampung, bergeser dari sekitar kota Bandar Lampung ke daerah Lampung Tengah dan Utara.

Pergeseran usaha rakyat antar propinsi terjadi dari Jawa Barat ke propinsi Jawa Timur, Sumatera Utara dan Jawa Tengah dan terakhir ke Lampung. Menurut data BPS (1996), usaha *broiler* dalam bentuk usaha rakyat hanya berkembang pada sembilan propinsi antara lain Jabar (34 persen), Jateng (20 persen), Jatim (18 persen), Sumut (9 persen) dan sisanya di Lampung dan Riau (6 persen). Hal ini juga terjadi untuk ayam petelur. Sebagian besar populasi ayam ras petelur berada pada propinsi yang sama dengan ayam *broiler*. Informasi ini memperlihatkan bahwa dari 27 propinsi di Indonesia, maka usaha rakyat hanya terdapat pada delapan propinsi dan seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten penghasil butir-butiran pakan ternak.

Pergeseran ini memberi petunjuk, bahwa usaha rakyat harus dikembangkan di wilayah produksi butir-butiran. Oleh karena itu, dari sisi produksi, sebaiknya program pengembangan usaha rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah sentra produksi butir-butiran. Pengalaman negeri maju dalam industri peternakan telah memperlihatkan bahwa industri ayam ras selalu dimulai dari wilayah sentra produksi butir-butiran (Nesheim *et al.*, 1979).

Perkembangan industri peternakan terutama usaha rakyat dilakukan di wilayah sentra produksi butir-butiran karena akan memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut: (a) kontinuitas produksi akan lebih terjamin karena suplai bahan baku pakan dari

wilayah sendiri dan pada sisi lain peternak mampu membuat sendiri pakan ternak; (b) biaya angkut bahan baku pakan menjadi lebih murah sehingga biaya produksi pakan dapat diturunkan; dan (c) biaya jasa pemasaran bahan baku dapat ditekan, karena peternak dapat berhubungan langsung dengan petani sehingga biaya produksi dapat diturunkan. Tentu saja peternak harus memiliki kemampuan dana sehingga tidak mudah menggantungkan diri pada pedagang-pedagang desa atau tukang ijon.

Kelemahannya adalah bahwa para peternak akan menggantungkan pemasaran hasil ternak pada pihak ke tiga karena jauhnya jarak pemasaran. Hal ini dapat diatasi dengan membentuk koperasi dan bantuan fasilitas yang menunjang dari pemerintah.

Struktur Produksi: Kebijakan Skala Usaha yang Menentang Arus

Kebijakan investasi masa lalu yakni pada tahun 1976 adalah membuka investasi seluas-luasnya baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Kebijakan investasi ini telah menodorong pertumbuhan industri pakan dan pembibitan dalam ukuran skala besar untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dalam paket besar pula. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai harapan bahwa pasar yang luas tersedia bagi produksi mereka. Namun, mereka kecewa, karena pemerintah pada tahun 1980, menerbitkan kebijakan pembatasan skala usaha ayam ras maksimum 5.000 ekor per orang/lembaga melalui Kepres 50/80. Sehingga usaha budi daya skala besar yang ada pada waktu itu harus segera ditutup.

Kebijakan pembatasan skala ini jelas menguburkan harapan pabrik pakan dan pembibitan yang sudah terlanjur menanam investasi besar. Mereka dihadapkan pada pasar yang tidak efisien, yakni melayani permintaan usaha rakyat, yang jelas sangat menyulitkan bisnis yang mereka hadapi. Untuk menyelamatkan usahanya, maka para industriawan pakan dan bibit membangun usaha budi daya sendiri dalam skala besar dan mengabaikan Kepres 50/80 tersebut. Tanpa kendali pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya Kepres 50/80, ternyata usaha budi daya skala besar tersebut berkembang pesat khususnya di wilayah Jabotabek. Kondisi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Kepres 50/80 tersebut tidak efektif sama sekali. Para peternak rakyat merasa tidak mampu bersaing dengan skala besar

dan merasa pemerintah tidak serius melindungi mereka, maka terjadilah unjuk rasa yang mendesak pemerintah untuk membatasi skala besar tersebut.

Pemerintah tidak mungkin membubarkan usaha skala besar untuk kedua kalinya sementara larangan yang pertama mengalami kegagalan. Jalan paling aman adalah mencabut Kepres 50/80 dan mengumumkan berlakunya Kepres 22/90. Kepres yang baru ini memberikan keleluasaan bagi pemilik modal untuk masuk ke budi daya skala besar tetapi untuk tujuan ekspor, dan dalam menjalankan usahanya, perusahaan besar tersebut harus melakukan kemitraan dengan peternak rakyat. Pada sisi lain pemerintah meningkatkan skala usaha rakyat dari 5.000 ekor menjadi 15.000 ekor, karena skala usaha 5.000 ekor terbukti tidak efisien. Namun pemerintah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, yakni tetap tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap pertumbuhan skala usaha besar, bahkan Juklak Kepres 22/90 itu sendiri baru diterbitkan 7 tahun kemudian yakni tahun 1997.

Maka tidak dapat dihindarkan bahwa struktur produksi budi daya lebih mengarah pada usaha skala besar yang tentunya dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan usaha rakyat. Dengan demikian Kepres 50/80 dan 22/90 yang ditujukan untuk mendorong usaha rakyat ternyata tidak mampu menghadapi kekuatan pasar, sehingga terlepas dari kontrol. Sebagian besar usaha rakyat di wilayah pusat produksi hasil ternak terbesar yakni Jabotabek, harus menutup usahanya, karena selain tidak efisien, mereka sukar mendapatkan pakan ternak dan pasar telur serta *broiler* karena sudah tertutup oleh perusahaan skala besar. Usaha rakyat memang tidak layak bersaing dengan peternak skala besar. Temuan menarik lainnya (Yusdja, 1996), bahwa dalam 20 tahun terakhir, usaha rakyat tidak mengalami pertumbuhan skala usaha. Skala usaha tidak bergeser dari angka 1.000 sampai 2.000 ekor per peternak. Hal ini menarik perhatian, karena pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan skala usaha rakyat menjadi 15.000 ekor menjadi tidak jelas maknanya, tanpa disertai dengan kebijakan lain.

Sebenarnya dengan terbitnya Kepres 22/1990 disusul dengan petunjuk pelaksanaannya yang baru terbit tujuh tahun kemudian, memperlihatkan bahwa pemerintah tetap konsisten dengan komitmen tersebut, walaupun tidak konsisten dengan pelaksanaannya. Pada sisi lain, pemerintah berdasarkan pengalaman selama ini, kurang memiliki kemampuan mengatur kekuatan pasar yang terus melayani pertumbuhan usaha skala besar.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa dalam menciptakan pemerataan kesempatan berusaha haruslah seiring dengan pemanfaatan kekuatan pasar melalui strategi kebijaksanaan yang tepat sehingga dua tujuan yakni efisiensi dan pemerataan pendapatan dapat dicapai dengan *trade off* yang serendah mungkin. Ada keyakinan yang mungkin dapat dipikirkan bahwa pada tahap awal pembangunan dengan azas pemerataan memang bertentangan dengan prinsip efisiensi tetapi apabila ekonomi sudah berjalan penuh artinya semua sumber daya sudah dimanfaatkan maka pertumbuhan dapat secara bersama-sama dan bukan karena satu dua perusahaan besar, dan kondisi ini akan sangat memperkuat perekonomian negara dan pertumbuhan ekonomi pada fase tersebut selain lebih cepat tetapi juga didukung oleh kekuatan yang dibentuk oleh banyaknya jumlah perusahaan.

Yusdja (1996) menyarankan perlunya ditetapkan skala minimum usaha rakyat pada tingkat yang memungkinkan usaha rakyat itu bertahan secara kontinyu dan mandiri. Dengan demikian pemerintah hanya mengkonsentrasikan diri pada usaha rakyat skala minim tersebut, dan pemerintah tidak perlu mengurus skala usaha rakyat 1.000 sampai 2.000 ekor tersebut karena skala usaha semacam itu tidak efisien dan dapat dikategorikan sebagai usaha *hobby* atau sambilan. Untuk mencapai skala usaha tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan pelayanan investasi dengan bunga yang rasional. Jika pemerintah mampu memobilisasi peternak rakyat dengan skala minimum 25.000 ekor tersebut, maka akan sangat mudah mengontrol kehadiran skala raksasa melalui organisasi-organisasi peternak yang kuat ini.

Struktur Kelembagaan: Kemitraan Yang Disintegrasikan

Kemitraan agribisnis, dua kata yang enggan dibahas, tetapi terus menerus menjadi polemik. Sampai hari ini masalah kemitraan antara peternak dengan pengusaha besar belum juga usai. Di sana sini, berbagai kemitraan peternakan dan juga pertanian secara keseluruhan mengalami disintegrasi (Yusdja dan Saptana, 1995). Namun kejadian demi kejadian tidak melemahkan semangat bangsa membangun kemitraan yang telah menjadi komitmen negara. Pemerintah mempercayai bahwa kemitraan merupakan media yang tepat untuk membangun usaha rakyat yang tangguh dan mandiri.

Masalahnya memang klasik, yakni beranjak dari kondisi ekonomi negara yang sedang berkembang dan perekonomian yang pada umumnya ditopang oleh usaha rakyat. Pada sisi lain, negara menghadapi jumlah penduduk yang besar dengan kondisi ekonomi yang menyedihkan. Karena itu pemerintah mempunyai beban moral untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat, sekali pun hal itu disadari menyimpang dari tujuan efisiensi. Namun usaha rakyat dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami pertumbuhan cepat, bisa tertinggal jauh di belakang dan pada akhirnya hilang dari pasar. Karena itu, menurut pemerintah, kemitraan antara usaha besar dan kecil merupakan media alternatif bagi melindungi usaha rakyat. Komitmen ini akan tetap dipertahankan sekali pun Indonesia menghadapi ekonomi global.

Kemitraan itu sendiri sebenarnya bertujuan mengangkat usaha rakyat melalui kerjasama dengan usaha skala besar baik dalam bentuk hubungan vertikal maupun horizontal. Namun pengalaman memperlihatkan bahwa banyak kegagalan yang dialami oleh kemitraan berujung pada pelanggaran kesepakatan yang telah mereka buat. Pada dasarnya media kesepakatan yang digunakan sangat lemah, artinya tidak menjamin pihak-pihak selalu konsisten dengan kesepakatan tersebut. Salah satu bentuk media kemitraan yang paling umum digunakan adalah kesepakatan harga *output* dan *input*. Dalam hal ini semua pihak yang bermitra menyepakati suatu tingkat harga *output* dan *input* yang secara teori tingkat harga tersebut tentu saja saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pertanyaannya adalah apakah tingkat harga merupakan media yang efektif bagi kerja sama dalam bermitra? Pertanyaan ini penting, karena secara teori tingkat harga merupakan sinyal pasar atau sinyal kondisi penawaran dan permintaan. Ini berarti, bahwa harga sebagai sinyal, mempunyai karakter yang selalu berubah-ubah khususnya dalam pasar bersaing sempurna. Dalam pasar bersaing sempurna, ada sebagian perusahaan yang harus keluar dari industri karena perubahan-perubahan harga tersebut (Hirsleifer, 1985). Sebaliknya perusahaan yang efisien akan bertahan atau mengembangkan produksi sesuai dengan sinyal harga tersebut. Ini berarti penggunaan tingkat harga sebagai media kemitraan sama saja dengan menggunakan kekuatan pasar untuk mengatur kemitraan, dan ini berarti perusahaan-perusahaan yang lemah dalam kemitraan tersebut akan tergilas sendiri.

Pengalaman telah membuktikan hal tersebut. Banyak kemitraan sektor koperasi yang mengalami disintegrasi karena menggunakan harga sebagai media kemitraan (Saptana dan Suhartini, 1995; Sumaryanto dkk., 1989). Misalnya kasus kemitraan peternak *broiler* dengan *poultry shop* dan kasus kemitraan GAPPI (Grup 7, 1994). Dalam kemitraan ini *poultry shop* memberikan kredit bibit dan pakan kepada peternak rakyat dan peternak rakyat membayar kredit tersebut dengan menjual *broiler* yang dipeliharanya kepada *poultry shop*. Dalam kemitraan, mereka menyepakati suatu tingkat harga *broiler* sebagai media.

Dari berbagai kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang menggunakan tingkat harga sebagai media ternyata tidak efektif. Beberapa pertimbangannya adalah sebagai berikut: (a) harga hasil-hasil peternakan pada umumnya tidak stabil, selalu berfluktuasi, sehingga mempengaruhi harga kesepakatan, (b) harga *input* peternakan – umumnya produk industri - selalu mempunyai kecenderungan naik lebih cepat dibandingkan kenaikan harga hasil peternakan, sehingga posisi harga kesepakatan sering menjadi tidak imbang lagi; (c) harga kesepakatan selain dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dalam negeri juga dipengaruhi oleh harga dunia, khususnya jika komoditas tersebut diimpor ke Indonesia; (d) pengaruh bentuk pasar monopoli atau oligopoli – umumnya produsen atau pedagang *input* dan *output* dari sisi industri - menyebabkan petani berada pada posisi menyepakati harga yang kurang menguntungkan; dan (e) pengusaha besar dalam kemitraan tersebut, cenderung mau enak sendiri, tidak konsisten dalam kesepakatan harga dan tidak bersikap positif terhadap tujuan sosial kemitraan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut maka sebaiknya kemitraan agribisnis mencegah penggunaan harga sebagai media kemitraan. Kita harus berani mencoba menggunakan media lain, media yang lebih kental dan dapat mendorong terciptanya daya saing hasil pertanian dalam pasar dunia. Tetapi bagaimana? Sebenarnya Departemen Koperasi telah mengumandangkan tiga azas kemitraan yakni saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat. Sayangnya Departemen Koperasi belum mampu menjabarkan azas tersebut ke dalam bentuk operasional. Sehingga tetap menjadi pertanyaan: mungkinkah kemitraan dengan ketiga azas tersebut dapat ditegakkan?

Azas yang dapat digunakan adalah azas bagi hasil berdasarkan porsi biaya yang dikeluarkan per unit

produksi. Hal ini berbeda dengan bagi hasil berdasarkan banyaknya porsi saham yang ditanamkan dalam usaha bersama itu, karena bentuk ini merupakan bentuk ekonomi kapitalis. Bentuk bagi hasil berdasarkan biaya ini membebaskan kemitraan dari gejolak perubahan harga, karena kenaikan harga akan membebani semua pihak sedangkan kenaikan keuntungan akan memberikan *benefit* kepada semua pihak. Sebaliknya setiap elemen produksi tentu berusaha mengurangi biaya yang dikeluarkannya, karena ini akan menyebabkan maksimum keuntungan pada elemennya sendiri.

Struktur Pasar: Peran Sentral Industri Pakan

Pakan ayam ras merupakan *input* utama dalam peternakan ayam sebagai bahan baku produksi daging dan telur. Biaya pakan termasuk sekitar 70 persen dari total biaya. Kenyataan ini sebenarnya memberikan informasi luas bahwa salah satu indikator kemajuan produksi ayam ini adalah keberhasilan dalam menangani masalah bahan baku pakan. Sebenarnya, jika kita merujuk pada Williamson dan Payne (1978) dan Parakkasi (1983), Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan sekian ratus bahan baku pakan di dalam negeri, namun hanya sekitar 10 jenis yang populer digunakan antara lain jagung, kedele, dedak, tepung ikan, kacang-kacangan, ubi kayu, dan sebagainya. Namun demikian, perusahaan pakan nasional, selama 25 tahun mengabaikan kenyataan ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, Hutabarat dan Yusdja (1994) mengungkapkan bahwa industri pakan telah berkembang dengan kecenderungan menuju pemusatan industri pada titik monopoli. Hal ini diperlihatkan oleh berkurangnya jumlah pabrik pakan skala kecil, sebaliknya jumlah pabrik pakan skala besar terus meningkat. Yusdja dan Pasandaran (1996) memberikan dukungan yang lebih luas yakni kecenderungan pertumbuhan industri pakan menuju bentuk monopoli di atas dapat pula dilihat dari porsi produksi pakan dari sekelompok pabrik pakan dalam industri. Menurut analisis pasar terdapat dua perusahaan besar yang menguasai lebih setengah pangsa pasar pakan unggas yang tersedia. Diperkirakan mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan harga pakan selama ini.

Tingkat keuntungan pabrik pakan ditentukan oleh biaya bahan baku makanan ternak yang digunakan, dan bagaimana meramunya menjadi pakan yang

memenuhi syarat biaya produksi pakan dan biaya pemasaran. Keberhasilan pabrik pakan memperoleh keuntungan yang maksimum ditentukan oleh banyak faktor. Yusdja dan Pasandaran (1996) memperlihatkan bahwa biaya bahan baku makanan ternak merupakan biaya terbesar bagi pabrik pakan, yakni 78,8 persen dari total biaya. Di lain pihak biaya memproduksi adalah 7,8 persen dan pemasaran 4,4 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya produksi pakan sangat rendah, dengan kata lain biaya investasi relatif kecil sehingga sebenarnya perusahaan baru tidak akan menghadapi kesulitan jika ingin mendirikan pabrik pakan. Masalahnya adalah kemampuan dalam menguasai bahan baku.

Keuntungan yang diperoleh pabrik pakan ini dinilai terlalu besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh peternak skala kecil. Besar keuntungan ini dapat disimak dari laporan Purnomo (1996), di mana keuntungan sebuah pabrik pakan relatif besar yakni lebih dari Rp. 20 milyar pada tahun 1995 dan meningkat menjadi lebih kurang Rp. 25 milyar pada tahun 1997 sebelum krisis moneter. Keuntungan yang semacam itu tentu saja tidak adil jika dibandingkan dengan usaha peternak kecil yang kondisinya jatuh bangun. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan yang dapat menjamin adanya distribusi pendapatan yang adil di antara pelaku industri peternak itu sendiri dan bukannya di antara pemilik saham masyarakat.

Pada sisi lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa telah terjadi pergeseran pabrik pakan dari wilayah Jabotabek ke wilayah sentra produksi butir-butiran. Ternyata pergeseran penanaman modal pabrik pakan ke Jawa Timur dan Lampung telah menimbulkan masalah baru yakni peternakan rakyat yang hidup di wilayah itu mulai terusik. Hal ini berawal dari produksi jagung di wilayah sentra produksi tersebut kurang mencukupi kebutuhan sehingga timbul persaingan dengan peternak setempat yang umumnya membuat sendiri kebutuhan pakan. Tentu saja dalam persaingan tersebut posisi pabrik pakan lebih kuat. Hal ini dibuktikan oleh usaha-usaha yang dilakukan pabrik pakan antara lain membangun gudang-gudang jagung di wilayah produksi. Gudang-gudang jagung ini baik masa panen atau paceklik memborong persediaan jagung sebanyak-banyaknya dengan harga yang rendah. Tindakan itu telah membuat peternak setempat harus membeli jagung dari gudang milik pabrik pakan dengan harga yang lebih mahal (Yusdja, 1996).

Struktur Industri : Integrasi Yang Disintegrasikan

Industri unggas nasional terdiri atas beberapa segmen kegiatan yang satu sama lain memiliki ketergantungan yang sangat besar karena menyangkut kebutuhan biologis. Segmen pertama adalah budi daya, kemudian segmen pabrik pakan, pembibitan, farmasi, industri rumah potong dan selanjutnya pengemasan (Nesheim *et al.*, 1979). Urutan segmen produksi terintegrasi tersebut berada dalam satu unit perusahaan bahkan juga berada dalam lokasi perusahaan. *Transfer output intermediate* sangat hemat dalam biaya angkutan, kemasan, risiko kematian/kerusakan dalam perjalanan, risiko penghematan tenaga kerja dan tidak ada margin keuntungan pada setiap segmen. Oleh karena itu struktur produksi vertikal semacam itu memberikan hasil akhir yang lebih efisien dibandingkan jika segmen tersebut berserakan baik menurut perusahaan maupun berdasarkan lokasi perusahaan.

Indonesia memiliki corak struktur industri unggas yang banyak didorong oleh pengaruh kebijaksanaan pemerintah. Sebelum tahun 1970, seluruh rangkaian produksi yang dibahas di atas berada dalam satu unit usaha sekali pun dalam ukuran skala kecil yakni usaha rakyat. Dengan kata lain, usaha rakyat pada masa lalu mempunyai pengolahan pakan, melaksanakan pascapanen, memasarkan, dan menghasilkan bibit sendiri. Tetapi kemudian, perkembangan industri unggas tumbuh menurut segmen-segmen tersendiri, maka kita mengenal adanya perusahaan pabrik pakan yang menghasilkan pakan untuk perusahaan pembibitan dan perusahaan budidaya. Demikian juga kita memiliki perusahaan pembibitan untuk menghasilkan bibit untuk perusahaan peternakan, sehingga apa yang dimaksud dengan peternakan adalah terbatas pada budi daya itu sendiri. Dengan demikian, konsumen hasil akhir harus membayar mahal biaya-biaya ekonomi yang ditimbulkannya.

Setelah tahun 1990 ada kecenderungan industri nasional membentuk integrasi vertikal tetapi baru dalam bentuk kesatuan finansial atau berbeda manajemen yang terdiri atas beberapa perusahaan yang tidak terintegrasi, baik dalam satu perusahaan apalagi dalam satu lokasi. Integrasi semacam ini kita sebut integrasi semu. Saat ini kita mengenal beberapa grup yang memiliki 5 sampai 7 perusahaan yang keseluruhannya merupakan segmen-segmen agribisnis unggas. Berbagai sumber informasi melaporkan antara lain Bisnis Indonesia

(1994), Business Survey and Report (1995) didukung oleh data statistik Direktorat Jenderal Peternakan (1993, 1994, dan 1995) bahwa beberapa perusahaan pabrik pakan skala besar telah melakukan integrasi sekali pun secara semu. Bahkan beberapa di antaranya melakukan integrasi dari hulu sampai ke hilir. Contoh perusahaan yang melakukan integrasi ini adalah CP grup, Carghil, Sierad dan terakhir adalah Grup Subur yang cikal bakalnya adalah perusahaan pakan pada tahun 1997 meresmikan perusahaan ketujuh yang bergerak dalam bidang industri peternakan (Poultry Indonesia, 1997).

Secara nasional usaha semacam ini tidak efisien karena hanya menguntungkan bagi pemilik modal tetapi biaya produksi menjadi lebih tinggi dan menjadi beban bagi konsumen. Djarsanto (1997; dalam Poultry Indonesia, 1997) mengatakan bahwa masing-masing subsistem dalam industri peternakan mau menang sendiri, tidak mau berpadu. Keadaan ini sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap penurunan biaya, malah meningkat, dengan kata lain harga *output* tidak berubah antara sebelum dan sesudah integrasi. Seharusnya, dengan integrasi maka harga *output* akan lebih rendah.

Integrasi seperti di atas telah memberikan keuntungan secara akumulatif dari setiap subsistem, sehingga memberi keuntungan yang besar bagi pemilik modal. Apalagi, dengan menguasai pangsa pasar yang besar maka perusahaan induk finansial dapat mengatur pasar sehingga menimbulkan suatu integrasi yang merugikan peternak yang berada di luar sistem tersebut.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI, 1996) bahwa peternak yang bebas yakni tidak terintegrasi mengeluarkan biaya pemeliharaan 150 persen lebih mahal dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang terintegrasi. Yusdja (1996) menemukan bahwa peternak bebas dan terintegrasi untuk ayam petelur memperlihatkan usaha mandiri hanya memperoleh keuntungan 14,6 persen dibandingkan yang terintegrasi sebesar 69,1 persen. Untuk *broiler*, peternak bebas menerima keuntungan relatif sangat kecil yakni 0,9 persen sedangkan yang terintegrasi sebesar 36 persen.

Pada sisi lain, Yusdja dan Pasandaran (1996) telah mencoba memperhitungkan bagaimana distribusi keuntungan dalam industri ayam ras nasional, yakni antara pabrik pakan, pembibitan dan peternak. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa terdapat ketimpangan yang mencolok dalam distribusi keuntungan tersebut. Misalnya saja dari total

keuntungan industri ayam petelur maka pabrik pakan memperoleh 68 persen, sementara peternak 31 persen, tetapi pembibit memperoleh satu persen. Untuk *broiler*, peternak hanya menerima tiga persen, sementara pabrik pakan 72 persen dan pembibit 25 persen. Dengan demikian peternak *broiler* menerima bagian yang relatif sangat kecil.

Kini ada dua masalah pokok yang timbul ke permukaan yakni integrasi vertikal semu dan monopoli/oligopoli. Integrasi vertikal yang terjadi saat ini masih jauh dari bentuk yang sesungguhnya. Pada sisi lain integrasi semu ini cenderung tumbuh membentuk monopoli atau oligopoli. Thailand sebagai negara Asia yang sudah maju industri *broilernya*, telah sejak semula membangun industri *broilernya* secara terintegrasi, tetapi terjerumus ke dalam bentuk monopoli (Panayotou, 1985). Sekali pun integrasi tidak saja merupakan suatu keharusan dan memang harus begitu namun tidak harus disertai watak monopoli.

Salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi yang ada saat ini adalah karena struktur perizinan. Struktur perizinan usaha yang ada saat ini tidak menguntungkan sektor pertanian. Sebagai contoh, jika seorang pengusaha bermaksud mendirikan usaha peternakan ayam, pabrik pakan untuk kebutuhan sendiri dan pembibitan maka dia harus memiliki tiga buah surat izin. Hasilnya adalah terciptanya tiga buah perusahaan yang terintegrasi tetapi berbeda manajemen sebagaimana telah dibahas. Sebagaimana telah diperlihatkan bahwa integrasi semu ternyata mendorong terjadinya peningkatan biaya, maka pemerintah sebaiknya segera melakukan deregulasi dalam bidang perizinan usaha peternakan. Sistem perizinan per sektor dan per komoditas yang berlaku saat ini tidak sesuai untuk membangun industri ayam ras yang efisien.

Sebagai contoh sebuah kemitraan agribisnis ayam ras dalam satu perusahaan yang terintegrasi di Australia sebagaimana yang disampaikan oleh Yusdja dan Riethmuller (1996) adalah perusahaan peternakan Mt Cotton Farm. Ia memiliki mesin-mesin untuk pembuatan pakan dan memiliki pembibitan sendiri sehingga kebutuhan pakan dan bibit dipenuhi sendiri. Mt Cotton Farm tidak menjual *DOC* dan pakan kecuali untuk digunakan sendiri dan untuk peternak yang melakukan kontrak kerja sama produksi. Selain itu Mt Cotton Farm mempunyai mesin-mesin pemotongan ayam sendiri dalam peternakannya, sehingga peternak Mt Cotton Farm menghasilkan karkas yang siap masak. Peternak yang dikontrak menerima *input* dari Mt Cotton Farm sesuai dengan harga pokok, sehingga peternak

kontrak menerima pendapatan dari *margin* keuntungan itu sendiri, dari tenaga kerja dan dari investasi yang mereka gunakan. Kontrak semacam ini berjalan baik karena Mt Cotton Farm melakukan kemitraan tersebut untuk memenuhi pangsa pasar yang cukup tinggi dan terus berkembang.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI KRISIS MONETER

Setelah krisis moneter, penurunan produksi telur dan pedaging anjlog demikian cepat sehingga lonjakan harga-harga demikian tinggi. Salah satu sebabnya adalah kenaikan bahan baku impor karena naiknya nilai tukar. Untuk menghadapi kenyataan ini dan untuk meningkatkan produksi telur dan daging, pemerintah membuat kebijakan baru yang tertuang di dalam laporan Direktorat Jenderal Peternakan (1998). Direktorat Jenderal Peternakan dengan pertimbangan bahwa akan dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak krisis moneter antara lain untuk ketahanan pangan sebagai upaya yang mendesak melalui program penyelamatan industri ayam ras. Program penyelamatan ini melalui *crash program* penyaluran skim kredit, menurunkan biaya produksi dan pembelian jagung dalam negeri.

Penyaluran skim kredit tersebut bertujuan menghidupkan kembali usaha budi daya ayam ras, khususnya ayam *broiler* dalam bentuk kredit modal kerja untuk usaha menengah kecil (KMK-UKM) dengan bunga 17 persen per tahun. Dengan kucuran kredit tersebut diharapkan dapat memutar kembali roda perekonomian rakyat, khususnya perunggasan rakyat. Besar kredit tersebut adalah Rp. 25 juta per peternak.

Tampaknya, ini bukanlah jalan yang tepat dalam menyelamatkan usaha rakyat. Pengalaman memperlihatkan bahwa usaha rakyat dalam keadaan normal ternyata menghadapi kesulitan dalam menembus pasar. Masalah utama yang mereka hadapi adalah sempitnya pasar produksi karena persaingan dengan skala besar. Setelah krisis moneter, justru peternak skala besar yang mampu menguasai pakan, dapat hidup layak (Tim Unggas, 1998). Oleh karena itu bantuan Rp. 25 juta barangkali disimpan oleh peternak dalam bentuk deposito dengan bunga 5 persen per bulan atau Rp 1.250.000 juta per bulan, tanpa risiko dan ketakutan. Pada kenyataannya, sebagai terlihat dalam berbagai berita surat kabar, kredit ini tidak mampu menyelamatkan produksi telur dan *broiler*.

Kebijaksanaan menurunkan biaya produksi yang dilaksanakan adalah melalui subsidi impor sebesar perbedaan nilai tukar rupiah dengan US\$ pada saat impor dengan nilai tukar tetap yakni Rp. 5.000 per 1 US\$ untuk impor bungkil kedele dan tepung ikan. Dengan bantuan subsidi impor ini diharapkan harga jual pakan dapat diturunkan menjadi Rp. 1.200/Kg. Tampaknya pemerintah seakan-akan membuat kesepakatan harga dengan pabrik pakan dengan fasilitas tersebut. Pada kenyataannya harga pakan terus melambung hingga mencapai Rp. 2.500/Kg (Poultry Indonesia, 1998), sehingga masyarakat peternak menuduh kebijaksanaan subsidi ini hanya dinikmati oleh pengusaha besar, khususnya pabrik pakan. Memang masuk akal tuntutan semacam itu. Tidak tercapainya harga pakan yang diharapkan, tidak bisa ditentukan oleh harga dan bungkil kedele saja, tetapi juga ditentukan oleh harga bahan baku yang lain seperti tepung ikan, antibiotika dan *feed supplement*, serta nilai tukar US\$ dan kenaikan harga jagung dan bungkil kedele dunia.

Kebijaksanaan ketiga adalah penyediaan dana untuk pembelian jagung produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui koperasi (KUD) bekerja sama dengan pabrik pakan. Kebijakan ini kalau sempat dilaksanakan tampaknya kurang tepat. Jagung sudah diperebutkan di wilayah produksi, karena harga jagung terus mengalami kenaikan yang tajam. Pemerintah akan mendapat kesulitan memperoleh jagung, selain itu pabrik pakan sudah terbiasa bekerja sendiri tanpa bantuan KUD. Pada kenyataannya pabrik pakan terpaksa menghentikan produksinya, karena kehidupannya tidak semata-mata dari jagung saja. Apalagi, sebagai dilaporkan oleh BEJ bahwa terdapat 8 perusahaan pabrik pakan yang terdaftar di BEJ terpaksa dikeluarkan karena tidak mampu lagi melanjutkan usahanya. Artinya industri pakan sebagian besar yang berukuran raksasa sudah menghentikan produksinya. Kita melihat sederet kebijaksanaan di atas belum menyentuh permasalahan industri ayam ras di Indonesia.

ALTERNATIF KEBIJAKAN : RESTRUKTURISASI INDUSTRI AYAM RAS

Pertanyaan besar yang pasti timbul sekarang adalah apakah pemerintah sebaiknya mengundurkan diri dari intervensi pada industri ayam ras, dan membiarkan industri tumbuh menuju usaha skala besar, karena tuntutan efisiensi? Ataukah pemerintah tetap memegang

komitmen pada konsep pemerataan dan kesempatan berusaha dan karena itu, skala usaha rakyat harus selalu dilibatkan?

Apa pun pilihan yang dilakukan, pemerintah sebaiknya meluruskan struktur industri perunggasan yang morat marit ini terlebih dahulu. Karena jika strukturnya tepat, maka dapat dipastikan bahwa perkembangan industri ayam ras justru mendorong pertumbuhan usaha skala kecil dan menengah. Usaha skala besar akan sulit berkembang dalam struktur industri yang tepat, karena akan mengandung risiko yang besar.

Jika demikian halnya, kita perlu melakukan restrukturisasi industri peternakan dengan berbagai saran-saran sebagai berikut:

Bentuk budi daya ayam ras harus mengandung setidaknya tiga komponen yakni budi daya, pengolahan pakan dan pascapanen/pemasaran. Jika ingin lebih lengkap, maka bentuk budi daya harus mempunyai pembibitan untuk menghasilkan *DOC final stock*, sehingga apa yang disebut dengan peternakan adalah suatu pemeliharaan ternak yang meliputi pembibitan, pembuatan pakan, pemeliharaan dan pascapanen. Dengan demikian, sebuah peternakan akan mengelola semua komponen secara terpadu. Konsep ini akan memberikan beberapa konsekuensi antara lain, tidak ada lagi perdagangan pakan, dan diganti dengan perdagangan bahan baku pakan. Dengan demikian para peternak tidak lagi berhadapan dengan fluktuasi harga pakan, karena mereka berhadapan dengan bahan baku pakan, dengan banyak pilihan untuk membuat pakan yang murah.

Untuk mensukseskan hal tersebut di atas, maka industri peternakan harus dibangun pada wilayah sentra produksi pertanian terutama butir-butiran seperti jagung, padi, kacang kedele, kacang tanah dan sebagainya. Kebijakan ini harus disertai dengan kebijakan pembangunan pertanian yang terkait dengan industri peternakan di wilayah tersebut. Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak usah memaksakan diri, membangun industri peternakan pada 27 propinsi, karena akan mubazir. Pelayanan pemerintah hanya mutlak diperlukan pada wilayah-wilayah sentra produksi. Wilayah yang sesuai untuk pembangunan industri ayam ras adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Pemerintah tidak usah melakukan intervensi dengan menetapkan besaran skala usaha rakyat, karena usaha ayam ras membutuhkan modal yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Dengan demikian usaha ayam ras

tidak sesuai dengan tingkat kekayaan yang dimiliki oleh para peternak rakyat. Apa yang diperlukan oleh pemerintah adalah menyediakan fasilitas sehingga usaha rakyat mampu mencapai skala usaha yang mendorong kemandirian dan efisiensi. Jika usaha rakyat tidak dikembangkan dalam skala semacam ini, maka yang akan muncul adalah skala usaha raksasa, dalam usaha memenuhi kebutuhan pasar. Karena itu kecenderungan timbulnya monopoli tidak dapat dielakkan. Usaha rakyat yang ada selama ini hanya berkisar antara 500 sampai 2000 ekor sebaiknya tidak perlu menjadi masalah, karena usaha semacam ini sebaiknya dianggap sebagai usaha sampingan atau hobi.

Untuk mencapai efisiensi dalam bentuk skala besar, maka tidak ada lagi integrasi vertikal antara komponen industri, karena usaha peternakan dilaksanakan secara terpadu dalam unit terkecil yakni skala menengah. Kemitraan horizontal tidak diperlukan, karena dengan skala usaha menengah dan dengan dukungan pengadaan bahan baku pakan yang efisien, produksi ayam ras akan mampu bersaing baik di dalam mau pun di luar negeri. Jika kemitraan akan dibangun secara vertikal pun maka itu hanya terjadi antara distributor besar dengan para peternak. Kemitraan semacam ini dapat dikembangkan dengan sekaligus bertujuan mengatur suplai. Untuk ini diperlukan suatu organisasi pemasaran sementara *Egg Marketing Board* dan sebagainya.

Konsekuensi restrukturisasi di atas adalah dihapusnya pabrik pakan skala besar yang berada di Jabotabek. Kebetulan, sebagian besar pabrik pakan tersebut memang sudah bangkrut, maka konsekuensi ini tidak akan memberatkan pemerintah dalam pelaksanaannya. Tetapi industri peternakan skala besar harus segera dikontrol tingkat produksinya, supaya tidak cenderung menjadi monopoli. Pemerintah harus segera melakukan pendataan untuk mensukseskan pengawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 1993. Sensus Peternakan: Seri Peternakan Ayam. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 1996. Sensus Pertanian 1993. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Sub Sektor Peternakan dan Perikanan. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Bisnis Indonesia. 1994. Kumpulan *Clipping* Agribisnis, Surat Kabar Bisnis Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. PSE. Bogor.

- Business Surveys and Reports. 1995. *Price of DOC Lowered by up to 5% Due To Oversupply*. Indonesian Commercial Newsletter. Data Consul Inc. Jakarta
- Direktorat Jenderal Peternakan. 1993. Statistik Peternakan, 1993. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- _____ 1994. Statistik Peternakan, 1994. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- _____ 1995. Statistik Peternakan, 1995. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- _____ 1998. Perkembangan Peternakan Setelah Krisis Moneter. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta
- Grup 7. 1994. Pedoman Umum, Proyek Perunggasan Pola Kemitraan GAPPI. Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia. Jakarta.
- Hutabarat, B., dan Y. Yusdja. 1994. Dominasi Industri Pakan Dalam Penentuan Harga Jagung: Suatu Ciri Pola Kemitraan Yang Suboptimal. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Hirsleifer, J. 1985. Teori Harga dan Penerapannya. Terjemahan Kusnadi. UI-Press-Johns Hopkins. Jakarta.
- Nesheim, MC., R. E. Austia dan L. E. Lesly. 1979. Poultry Production. 12th Edition. Lea & Febiger. Philadelphia.
- Parakkasi, A. 1983. Ilmu Gizi dan Makanan Ternak. PT Angkasa. Bandung.
- Panayotou, Theodore. 1985. *Food Policy Analysis in Thailand*. Agricultural Development Council. Bangkok.
- PPUI . 1996. Menjangkau Sektor Hulu Hingga Hilir. Poultry Indonesia. Edisi Februari 97 No. 204. Jakarta
- Poultry Indonesia. 1997. Laporan Perkembangan Perusahaan Grup Subur, Pembangunan Perusahaan Yang Ketujuh. PI. Jakarta.
- _____ 1998. Laporan Perkembangan Harga. Edisi Februari, 1998. Poultry Indonesia. Jakarta.
- Pumomo, B. 1996. Keuntungan Industri Pakan Tahun 1993 Diperkirakan Naik. Poultry Indonesia No. 165/November 1993. PI. Jakarta.
- Rusastra, W. I., Sumaryanto, A. Jatiharti dan Y. Yusdja. 1990. Studi PIR Peternakan Ayam Ras. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saptana dan S.H. Suhartini. 1995. Agribisnis Ayam Ras Petelur dan Pedaging Melalui Pola Kemitraan di Propinsi Jawa Barat dan Lampung. Prosiding Agribisnis. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sumaryanto, I. W. Rusastra, dan A. Djatiharti. 1989. Analisis Usaha Ayam Petelur Peternak Plasma di Jawa Barat dan Lampung. FAE, Vol. 7. No 2, Desember 1989. Bogor.
- Tim Unggas. 1998. Skim Kredit Peternakan. Poultry Indonesia. Edisi Januari, 1998. Jakarta.
- Williamson, G and W. J. A. Payne. 1978. *An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics*. Third Edition. Longman. England.
- Yusdja, Y. 1996. Deregulasi dan Sistem Komoditas Pertanian di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. PSE. Bogor.
- _____ 1996. Daging Ayam Broiler, Bisakah Menjadi Komoditi Ekspor Andalan. Agribisnis Unggas. Majalah Pangan. No. 29. Vol III. 1996.
- _____ dan B. Hutabarat. 1994. Pola Perdagangan Jagung di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor.
- _____ dan E. Pasandaran. 1996. Analisis Harga Pokok dan Bentuk Pasar Pakan dan Kaitannya Dengan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Rakyat. JAE, Vol. 15. No.1 Mei 1996. Bogor.
- _____ dan Rethmuller. 1996. Laporan Perjalanan Tinjauan Peternakan di Queensland, Australia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- _____, R. Sayuti, dan H. Tarigan. 1996. Profil Ayam Ras Pascaderegulasi 1990. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- _____ dan Saptana. 1995. Disintegrasi Pola Kemitraan dan Inefisiensi dalam Industri Ayam Ras. Prosiding, 1995. Balitnak Ciawi. Bogor.